

Potret Eksistensi Birokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0

Portrait of the Existence of Bureaucracy in Indonesia from the Perspective of Industrial Revolution 4.0

Yahdi Qolbi¹, Budiman², Jumansyah³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Vol. II, No. 02
Page : 41-48
Published : 2023

KEYWORDS

Birokrasi, Reformasi Birokrasi,
Revolusi Industri 4.0.

CORRESPONDENCE

E-mail:
yahdiqolbi@fisip.unmul.ac.id

A B S T R A C T

Revolusi industri 4.0 terus berkembang dikalangan masyarakat dan ini jelas menuntut birokrasi harus terus bertransformasi, agar birokrasi tetap bisa selalu eksis ditengah cepatnya arus digitalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Weberian untuk memberikan penekanan yang kuat pada mesin birokrasi untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kesinambungan kelembagaan dan birokrasi yang ideal. Adapun metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan melakukan identifikasi dan analisis atas kondisi birokrasi pada era orde baru serta birokrasi pasca era reformasi. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas e-government Indonesia masih perlu pengembangan, terlebih sebenarnya sudah diimplementasikan di beberapa daerah provinsi di Indonesia, bahkan menjadi *discourse* bagi tata Kelola pemerintahan menuju *smart city*.

INTRODUCTION

Birokrasi masih kesulitan mengimbangi gerak cepat kaum milenial di era revolusi industry 4.0, ini dikarenakan pembagian meja menurut fungsi, birokrasi masih terkesan membingungkan. Birokrasi di kantor-kantor pemerintahan masih diasosiasikan dengan proses yang lamban, waktu yang berlarut-larut, dan sumber daya manusia yang belum siap menghadapi era revolusi industry 4.0. Oleh karena itu, kebutuhan akan apa yang biasa kita sebut dengan reformasi birokrasi harus tetap ada dan dilaksanakan. Dalam perjalananya, Perlakuan pemerintah terhadap teknologi, termasuk teknologi digital,seringkali terbilang lambat dalam berinovasi dan mengikuti tren yang ada.

Teknologi, inovasi, dan sektor publik padahal selalu terkait erat. Secara tidak sengaja, birokrasi sendiri mencegah terjadinya inovasi karena pola pikirnya dan banyaknya batasan. Misalnya, saja masih banyak perangkat pemerintah yang tidak mendorong

menggunakan internet sebagai kebutuhan sehari-hari alasannya karena akses internet didaerah masih terbilang sulit. Padahal revolusi industry 4.0 terus berkembang dikalangan masyarakat dan ini jelas menuntut birokrasi harus terus bertransformasi secara cepat juga agar birokrasi tetap bisa selalu eksis ditengah cepatnya arus digitalisasi yang cenderung menggunakan mesin sebagai alat utamanya.

Revolusi Industri 4.0 adalah perkembangan signifikan lainnya yang terjadi di dunia saat ini. Revolusi Industri 4.0 adalah pergeseran cara barang dan jasa diproduksi, dan dibedakan oleh sejumlah faktor, antara lain penggunaan Internet of Things (IoT), big data, otomatisasi, robotika, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Lembaga pemerintah serta sektor komersial menyadari perkembangan ini. Seiring dengan banyaknya potensi yang dihidirkannya, revolusi industri keempat juga membawa segudang isu sosial baru yang perlu dibenahi, seperti perdebatan tentang transportasi online; cybercrime, ancaman e-commerce terhadap ritel tradisional, dll.

Oleh karena itu, agar lembaga pemerintah dapat secara efektif menjalankan tugas dan perannya selama Revolusi Industri 4.0. maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai perjalanannya birokrasi dimasa lalu dengan segala persoalannya? dan juga paradigma era digital 4.0 sebagai solusi reformasi birokrasi modern

THEORETICAL FRAMEWORK

Birokrasi: Perspektif Weberian

Menurut model birokrasi Weber yang berdasarkan terminologi ilmu politik, birokrasi adalah suatu organisasi kolektif yang terdiri dari pejabat-pejabat yang secara jelas dan tegas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya, dan kewenangannya dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. organisasi. Sebab, pada hakikatnya birokrasi berdampak pada hubungan kerja yang berjenjang, tertib pengorganisasian, dan aturan prosedural dalam hirarki organisasi (Budiarjo, 2003).

Menurut Weber, “seseorang dalam organisasi birokrasi memiliki tiga tingkat kewenangan. otoritas yang logis terlebih dahulu. Otoritas tradisional menempati urutan kedua, diikuti oleh otoritas karismatik. Birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan netral dalam suatu negara yang beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku di bidangnya dalam konsep birokrasi Weber yang dikenal dengan istilah konservatif. Menurut Weber, birokrasi dibentuk atas dasar netral dan tanpa campur tangan pihak-pihak yang dapat merusak birokrasi dari kekuasaan politik. Untuk memenuhi kebutuhan massa tanpa memihak kelompok sasaran, netralitas birokrasi sangat dibutuhkan. Artinya, siapa pun yang memimpin negara birokrasi masih berhasil dan efisien memasok pegawai ke sektor public” (Firnas, 2016).

Birokrasi Weberian memberikan penekanan yang kuat pada mesin birokrasi

untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kesinambungan kelembagaan dan birokrasi yang ideal. Menurut interpretasi argumen Weber tersebut, bahwa lahirnya personel birokrasi yang mengikuti aturan. yang benar, tetapi juga menciptakan pekerja birokrasi yang beroperasi secara independen dari pengaruh kekuasaan. Pengertian ini juga digunakan dalam UU Netralitas Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “proses pengisian jabatan pegawai birokrasi dilakukan atas dasar kemampuannya, bukan atas dasar kekerabatan atau preferensi politik (ASN).

Selain pandangan Weber, konsep netralitas birokrasi juga merujuk pada huruf f Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang menyatakan secara tegas tidak memihak pada pengaruh dalam bentuk apapun dan tidak untuk kepentingan siapapun yang nantinya dapat mengganggu proses pelayanan publik karena adanya konflik kepentingan ASN”. Menurut undang-undang, netralitas birokrasi dapat diartikan bahwa aparatur sipil negara tidak boleh mencampuri baik langsung maupun tidak langsung jalannya partai politik atau urusan politik praktis. Akibat dari penekanan ASN tersebut, maka ASN menitikberatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik secara luas dan merata.

Budiono, (2017) Secara umum, dapat dikatakan bahwa mesin sipil negara yang otonom, bebas dari penemuan-penemuan dari berbagai kelompok dan partai politik atau organisasi non-ideologis yang terkait dengan kepentingan politik, merupakan model fundamental dari netralitas politik birokrasi.

Menurut gambaran birokrasi dan penekanan pada perlunya netralitas birokrasi, baik dari sudut pandang teoritis dan hukum, terutama terkait dengan kehadiran anggotanya atau birokrat dalam kegiatan organisasi. Sangat jelas bahwa fungsinya adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan umum suatu bangsa, yaitu pemenuhan kesejahteraan sosial.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, birokrasi sebagai organisasi pemerintahan yang utuh melaksanakan tugas negara dalam berbagai satuan organisasi pemerintahan.

Revolusi Industri 4.0

Prasetyo & Sutopo, (2018), Ungkapan dari sebuah ide berdasarkan revolusi industri keempat adalah "revolusi industri 4.0." Saat Hannover Fair diadakan pada tahun 2011, kata industri ini pertama kali muncul di Jerman. Dalam hal ini, negara Jerman sangat tertarik dengan hal ini. Jerman ingin dapat secara konsisten memimpin industri manufaktur dengan ini. Salah satu aspek dari kebijakan rencana pengembangan High-Tech Strategy 2020 adalah revolusi industri saat ini. Realisasi gagasan revolusi ini melibatkan partisipasi dari banyak negara. Tujuannya, untuk dapat memperkuat daya saing industri di setiap negara dalam menghadapi pasar global yang begitu dinamis, tetap sama, meskipun dengan sebutan atau frase yang berbeda-beda. Negara lain mungkin merujuk revolusi ini menggunakan nama atau frasa yang berbeda, seperti "manufaktur maju", "pabrik pintar", atau "internet industri barang".

Revolusi 4.0, menurut Sawitri, (2019), merupakan transformasi total seluruh aspek produksi industri melalui perpaduan teknologi digital dan internet dengan industri tradisional. Artinya ini menjelaskan bahwa periode revolusi 4.0 menonjolkan unsur kecepatan ketersediaan informasi, yang dalam setting industri selalu dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Istilah "revolusi industri 4.0" digunakan untuk menggambarkan periode di mana kecerdasan buatan dan teknologi digitalisasi sangat terintegrasi ke dalam banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Ini dijelaskan lebih lanjut dalam literasi lainnya. Disebutkan juga dalam sebuah jurnal bahwa Hoyles dan Lagrange menekankan kekuatan yang dapat diberikan oleh teknologi

digital ini. Ada daya tarik yang kuat terhadap pembelajaran dalam hal efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan di seluruh dunia.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan melakukan identifikasi dan analisis atas kondisi birokrasi pada era orde baru serta kondisi birokrasi pada saat ini yakni pada tahun 2023, hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar tergambar secara komprehensif atas keadaan birokrasi masa lalu (orde baru) dan pada era pasca reformasi dengan hadirnya revolusi industri 4.0.

Adapun data pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yakni data-data dari Lembaga-lembaga pemerintah seperti KPK, EDGI, United Nations. Data dari Lembaga-lembaga sekunder tersebut digunakan sebagai triangulasi dari data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

RESULT AND DISCUSSION

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model eksistensi birokrasi berbasis pemanfaatan era revolusi 4.0. Sebelum mengkaji lebih dalam penulis perlu menjelaskan konsep dasar birokrasi beserta beberapa hal yang menjadi kendala permasalahan dalam tubuh birokrasi dewasa ini. Birokrasi merupakan sebuah sistem organisasi publik yang berperan menjembatani dan memfasilitasi kepentingan hajat hidup orang banyak. Disisi lain, birokrasi dapat juga diartikan sebagai wadah untuk melayani kepentingan masyarakat yang memiliki struktur kepemimpinan yang jelas (Azizah & Handoyo, 2020).

Beberapa ilmuan barat seperti Max Webber menjelaskan tipe ideal birokrasi yaitu mempunyai model bentuk pasti yang didukung oleh semua fungsi dapat dijalankan dengan cara-cara rasional (Weber). Menurutnya tipe ideal

tersebut bisa digunakan dalam rangka membandingkan birokrasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Namun celakanya, teori Weber ini bersifat legal rasional artinya tidak cocok diterapkan pada birokrasi era digital saat ini. Karena sifatnya terlalu kuno, legal, kaku dan sangat birokratik. Sementara, iklim birokrasi seharusnya adaptif, luwes, informatif, murah dan cepat. Berbeda dengan pandangan Weberian,

Karl Marx menjelaskan bahwa birokrasi merupakan suatu kelompok partikular yang sangat spesifik. Menurutnya birokrasi bukanlah khas masyarakat meskipun eksistensi berkaitan dengan pembagian kelas. Singkatnya Marx mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan pemerintahan atau negara. Dengan demikian, birokrasi artinya menjadi instrument penting yang digunakan untuk melaksanakan sistem kekuasaan dalam sebuah negara.

Polemik Birokrasi Masa Lalu

Birokrasi menjadi landasan penting dalam fungsi pelayanan publik secara luas dan inklusif. Publik (masyarakat) menaruh harapan terhadap kinerja birokrasi untuk membawa kemajuan secara multidimensi bagi proses pembangunan bangsa. Dari mekanisme birokrasi yang baik, tentu akan semakin memudahkan melahirkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu untuk menuju akuntabilitas publik, transparansi, responsibilitas, efektivitas dan efisiensi. Sayangnya cita-cita birokrasi di Indonesia tersebut tidak serta merta berjalan ideal sebagaimana harapan publik. Reformasi politik era orde baru (1998) belum sejalan dengan arah reformasi birokrasi. Hal inilah yang menjadi masalah (*gap*) *urgent* di era kontemporer yang mengakibatkan proses pelayanan publik belum optimal, kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) masih rendah, kasus korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin kronis baik kalangan jabatan publik maupun jabatan politik (Eksekutif maupun legislative) (Hartati, 2020).

Sebagaimana data Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) tahun 2020, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati angka 85 dari 180 negara, sedangkan pada level ASEAN Indonesia berada di posisi ke 4 berada di bawah Singapura, Brunai Darusalam dan Malaysia. Singkatnya melihat kondisi dan angka ini mempertegas bahwa birokrasi di Indonesia belum mampu menciptakan iklim tata Kelola pemerintahan yang baik dan bermartabat. Historikal perjalanan birokrasi Indonesia sejak zaman kerajaan masa kolonial (orde baru maupun orde lama) birokrasi tidak dirancang atau *didesign* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*citizens*), melainkan ditujukan untuk mengabdikan pada kepentingan kekuasaan (Hartati, 2020). Hal ini terbukti melalui beberapa babak perjalanan reformasi birokrasi yang pernah dilakukan selama ini dari zaman OPA (*Old Public Administration*), menuju *New Public Management* (NPM) sampai fase ketiga *New Public Service* (NPS) yang akhirnya sekarang dikenal dengan NPG (*New Public Governance*)/*Good Governance*) belum juga terwujud. Kondisi ini menjadi krusial dikarenakan pelayanan publik yang berkualitas merupakan titik penting perhatian utama organisasi sektor publik.

Pelajaran penting dari paradigma OPA (1980an) yang bersifat klasik dan tradisonal sangat tidak relevan digunakan. Sejak berlaku kebijakan ini memberikan mandate kepada pemerintah, yakni birokrasi harus menyelesaikan masalah publik. Hak inilah yang mengakibatkan adanya *strong Government* (Pemerintah yang dominan) menjadi aktor tunggal dalam penyelesaian masalah. Demikianlah, yang pada akhirnya membawa transformasi menuju paradigma baru NPM. NPM berkembang di tahun 1980 an di Australia, Amerika, New Zealand dan Inggris.

Inti dari paradigma NPM yaitu sebagai bentuk upaya meningkatkan manajemen baru yakni membawa prinsip *private sector* dalam

area sektor publik. NPM mendesain konsep birokrasi melalui mewirusahaakan birokrasi (*reinventing Government*). Sementara, setelah mendapat kritik keras dari salah satu ilmuwan (Denhart) akhirnya melahirkan konsep baru dengan paradigma NPS. NPS lahir berakar dari beberapa konsepsi teori demokrasi. Di dalamnya merupakan campuran teori demokrasi yakni; demokrasi kewarganegaraan, masyarakat sipil dan komunitas, jaringan sosial dan social trust. Dengan demikian NPS beyond dari OPA maupun NPM, titik penekanannya mengajak pemerintah yang direpresentasikan melalui mekanisme birokrasi untuk *serve citizens, not customer; seek in the public interest; value citizenship over entrepreneurship* (melayani warga bukan customer, mengutamakan kepentingan publik, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan).

Paradigma Era Digital 4.0: Solusi Reformasi Birokrasi Modern

Berdasarkan beberapa kompleksitas masalah tersebut menurut penulis perlu dilakukannya langkah taktis untuk menjawab permasalahan klasik di masa lalu melalui beberapa bentuk inovasi teknologi seiring dengan adanya kran revolusi Industri 4.0. Hal ini untuk lebih menekankan pola *digital economy, intelligence, robotic, dan big data*. Adanya transparansi atau keterbukaan berkaitan dengan pelayanan yang mendorong kesadaran di masyarakat untuk lebih mengetahui hak dan kewajibannya. Revolusi industry 4.0 adalah babak baru yang haru dihadapi pemerintah (Faedullah et al., 2020), termasuk pemerintahan Indonesia di tengah situasi percaturan politik global.

Dengan demikian artinya arus teknologi digital inipun memaksa para aparatur pemerintah untuk bisa beradaptasi secara cepat agar terus mampu menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik secara tepat, cepat dan efisien. Oleh karenanya digitalisasi menjadi platform baru yang tidak bisa dihindari terlebih ditengah

situasi pandemic global. Mekanisme pelayanan harus berjalan secara efektif terlepas ada perantara ketiga yaitu teknologi digital. Maka artinya kekuatan inovasi teknologi dan penguatan sistem kolaborasi menjadi satu kesatuan penting di dalam membangun harmonisasi birokrasi modern hari ini. Selain itu, untuk mempertahankan eksistensi birokrasi ditengah era 4.0 juga harus mampu didukung oleh *resource* berupa sumberdaya manusia (SDM) yang memadai dan juga kualitas dari teknologi itu sendiri.

Sementara, menilik hasil survey dari Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang E-Government Development Index (EGDI) menyebutkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 88 dari urutan 193 negara pada tahun 2020. Meskipun posisi ini meningkat dari tahun sebelumnya 2018 yaitu berada di peringkat 107. Namun, skor rata-rata Indonesia masih jauh dari negara perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) seperti Brunei, Thailand, Malaysia, khususnya Singapura. Tabel di bawah ini akan menjelaskan secara jelas posisi Indonesia. Sementara dari tabel EGDI menjelaskan bahwa perkembangan e-government Indonesia belum optimal. Dengan demikian hal ini menjadi refleksi penting bahwa kualitas e-government Indonesia masih perlu pengembangan, terlebih sebenarnya sudah diimplemntasikan di beberapa daerah provinsi di Indonesia, bahkan menjadi *discource* bagi tata Kelola pemerintahan menuju *smart city*.

Tabel 1. E-Government Developpemt Index (EGDI) di ASEAN

Country	EDGI Level	Rating Class	Rank	EGDI	Online Service Index	Telecommunications Infrastructure Index	Human Capital Index
Singapore	Very High EGDI	VH	11	0.915	0.9647	0.8899	0.8904
Malaysia	Very High EGDI	V1	47	0.7892	0.8529	0.7634	0.7513
Thailand	Very High EGDI	V1	57	0.7565	0.7941	0.7004	0.7751
Brunei Darussalam	High EGDI	HV	60	0.7389	0.6353	0.8209	0.7605
Philippines	High EGDI	H3	77	0.6892	0.7294	0.5838	0.7544
Viet Nam	High EGDI	H3	86	0.6667	0.6529	0.6694	0.6779
Indonesia	High EGDI	H3	88	0.6612	0.6824	0.5669	0.7342
Cambodia	High EGDI	H1	124	0.5113	0.4529	0.5466	0.5344
Myanmar	Middle EGDI	M3	146	0.4316	0.2588	0.5234	0.5125
Laos People's Democratic Republic	Middle EGDI	M2	167	0.3288	0.1941	0.2383	0.5539

Sumber: *United Nations, 2020*

Menurut sejumlah kajian literatur di atas maka, Revolusi Industri menuntut birokrasi untuk terus berbenah, salah satunya dengan penerapan E-Government. Namun, pendekatan Indonesia untuk menerapkan e-government sebagian besar tetap sama dan masih jauh dari standar yang ideal dan diinginkan. Secara idealis, kekurangan itu ada baik dalam konteks lokal maupun global. Meskipun peningkatan yang luar biasa dalam hal kuantitas, kualitas masih kurang karena infrastruktur, sumber daya manusia, dan hukum yang tidak memadai. Oleh karena itu, ide dan pendekatan untuk membangun e-government harus ditingkatkan dari berbagai sudut. Peraturan dan standar pengembangan e-government harus ada untuk mencegah penyelenggara, di tingkat pusat dan daerah, untuk mendefinisikan dan menafsirkan sendiri e-government.

Maka diperlukan. Transformasi birokrasi, dimana pemerintah harus dibimbing untuk berpindah dari desain lama yang kurang inovatif ke desain baru yang lebih inovatif, manajemen inovasi, manajemen risiko, integrasi organisasi, serta membangun kolaborasi dan sinergi. Reformasi birokrasi federal lebih terikat pada pola kerja, budaya organisasi, dan cita-cita strategis yang ditentukan daripada sekadar perampingan dan perubahan prosedur.

Dalam pendekatan kelembagaan, "lalu lintas" ketatanegaraan dari eksekutif "turun" ke Kebijakan Administratif, dimana transformasi organisasi dengan budaya kerja dan tata kelolanya merupakan faktor penentu yang menentukan keberhasilannya, transformasi organisasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa. Untuk mengatasi persoalan statemet yang selama ini dipandang sebagai kelemahan organisasi pemerintahan, maka birokrasi yang dibangun melalui transformasi yang terencana dan terukur sangat diperlukan; sebagai akibatnya, perlu untuk meningkatkan daya tanggap, transparansi, membangun sistem yang

dapat diakses, dan menerapkan mekanisme untuk mengaktifkan "checks and balances".

Beberapa faktor, antara lain gaya kepemimpinan, budaya tempat kerja, proses kerja angkatan kerja, dan struktur organisasi yang dikembangkan agar adaptif terhadap perubahan dan dapat mempercepat birokrasi dalam perizinan, mendukung investasi, dan meningkatkan daya saing negara, semuanya berdampak pada bagaimana birokrasi dalam pemerintahan berubah.

Hal berikutnya yang dapat dilakukan pemerintah di era Revolusi Industri Keempat adalah melakukan inovasi di berbagai bidang tanggung jawabnya. Intinya, inovasi adalah penerapan konsep yang harus segera dilakukan dengan konsep yang segar dan masuk akal. Inovasi di sektor publik mengacu pada penerapan konsep yang segar dan masuk akal untuk menghasilkan efek dan transformasi dalam pengelolaan urusan pemerintahan, urusan publik, dan layanan publik. Pencarian ide (*idea creation*), pemilihan ide, eksekusi ide baru, dan diseminasi ide baru (*dissemination of new practice*) merupakan empat tahapan inovasi (Sorensen & Torfing, 2011). Organisasi pemerintahan modern di Indonesia telah mengadopsi inovasi.

Banyak organisasi pemerintah federal, negara bagian, dan lokal telah membuat inovasi di banyak bidang tanggung jawab dan tugas mereka, terutama dalam memberikan layanan publik ke lingkungan sekitar. Modal ini cocok untuk menghadapi 4.0. Temuan menunjukkan bahwa sejumlah variabel, termasuk pemimpin visioner, kepemimpinan transparan, pemangku kepentingan koperasi, dan keterlibatan masyarakat, dapat memfasilitasi adopsi inovasi (Prasetyo et al., 2016). Keberlanjutan inovasi adalah isu lain yang harus diperhitungkan saat menerapkannya pada sektor publik. Sehubungan dengan hal tersebut, budaya memberikan umpan balik, tanggung jawab, dan pembelajaran berkelanjutan menjadi beberapa aspek penting dalam menentukan umur panjang

inovasi di lembaga pemerintah (Van Acker & Bouckaert, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan Analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa ujung tombak pelaksanaan birokrasi public dilakukan oleh birokrasi. Namun demikian, mekanisme birokrasi pemerintahan selama ini belumlah menjawab akar masalah di akar rumput, kasus KKN beberapa tahun belakangan yang mendera pejabat public dan politik menjadi bukti, bahwa sistem skema birokrasi hari ini didesain hanya untuk melanggengkan sistem kekuasaan untuk akumulasi kapital semata. Alih-alih reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan dari mulai paradigma OPA, NPM, NPS sampai NPG atau good Governance belum mampu menjawab tantangan dan masalah klasik pada tubuh birokrasi. Maka tulisan ini kemudian ingin mengingatkan Kembali perlunya terobosan baru melalui inovasi digital yaitu menggunakan momentum era 4.0 yang mengharus semua pihak khususnya pemerintah harus adaptif, dan responsive untuk terus melaksanakan inovasi, penguatan teknologi dan kolaborasi, sehingga keterbukaan informasi akan semakin memudahkan masyarakat untuk mencapai akses publik dalam rangka menjalankan kewajiban sekaligus hak hak kewargaan lainnya.

Dengan demikian diharapkan bahwa revousi industry yang semakin massif mampu menjadi sumber energi terbarukan untuk kelanggengan sistem birokrasi public hari ini. Tidak dapat dibantah bahwa perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi revolusi ini menjadikan transformasi organisasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan.

Struktur organisasi pemerintah yang selama ini bersifat mekanistik, hierarkis

birokratis, departementalisasi yang kaku, formalisasi tinggi dan dan sentralistis perlu terus ditransformasi ke arah organisasi yang ramping tetapi kaya fungsi. Hal itu ditandai dengan informasi yang mengalir bebas, formalisasi rendah dan tim lintas fungsi, guna menjawab ketidakpastian yang tinggi dan lingkungan strategis organisasi pemerintah yang semakin dinamis dan kompleksitas yang tinggi.

Ukuran besarnya organisasi dengan struktur organisasi dan rentang kendali yang besar, tidaklah menjamin efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Yang lebih berperan adalah seberapa sukses transformasi organisasi dilakukan agar adaptif terhadap perubahan yang sedemikian cepat. di tengah berbagai fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya.

REFERENSI

- Azizah, N., & Handoyo, E. (2020). Dampak Inovasi Birokrasi dalam Bidang Pariwisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal*, 4(1), 16-20
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
- Budiono, F. B. (2017). Birokrasi dan Politik Studi Deskriptif Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313-336.
- Firnas, M. A. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi. *Jurnal Review Politik*, 6(1), 160-194.
- Hartati, S. (2020). Penerapan Model New Public Management (NPM) dalam Reformasi

Birokrasi di Indonesia. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65-84.

- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17-26.
- Prasetyo, P. S., Wicaksono, K. W., Herwanto, T. S., Mulyadi, G., & Malik, R. A. (2016). Proses dan implikasi innovative governance terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
- Sawitri, D. (2019). Revolusi Industri 4.0: Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(3).
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Administration & society*, 43(8), 842-868.
- Van Acker, W., & Bouckaert, G. (2018). What makes public sector innovations survive? An exploratory study of the influence of feedback, accountability and learning. *International Review of Administrative Sciences*, 84(2), 249-268.